

**Judul** : Ketua KPU dipecat  
**Tanggal** : Kamis, 04 Juli 2024  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 1

## Sejumlah Kasus yang Pernah Menjerat Hasyim Asy'ari

- **5 FEBRUARI 2024**  
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir pada Hasyim dan enam anggota KPU lainnya karena memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka tanpa mengubah syarat usia minimum capres-cawapres sesuai dengan Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023.
- **10 OKTOBER 2023**  
DKPP memberikan peringatan keras kepada Hasyim terkait dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pembulatan ke Bawah dari 30% Pencalonan Perempuan dalam Pemilu DPR/DPD. Enam anggota KPU lainnya juga menerima peringatan dari DKPP.
- **DESEMBER 2022**  
Ketua Umum Partai Republik Satu, Hasnaeni Mucin, melaporkan Hasyim kepada DKPP atas tuduhan pelecehan seksual.

- **20 MARET 2024**  
DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Hasyim terkait dengan pencoretan nama Irman Gusman dari daftar calon sementara (DCS) DPD RI.
- **MEI 2024**  
DKPP pernah menjatuhkan sanksi peringatan kepada Hasyim terkait dengan dugaan kebocoran data pemilihan pada Sistem Informasi Data Pemilih atau Sidalih KPU RI pada 2023.
- **3 JULI 2024**  
Hasyim dinyatakan terbukti melakukan tindakan asusila terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Akibatnya, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap.

SUMBER: DKPP/LTBANG 11  
10/10/2024/010



*Diperlukan upaya segera untuk segera memulihkan kinerja dan citra KPU. Apalagi sudah ada tugas yang menanti, yakni pilkada.*

**FERY WUYASTI**  
fery@mediaindonesia.com

**P**EMERINTAH dan DPR segera memproses pemberhentian Hasyim Asy'ari dan pergantian antarwaktu untuk mengisi kembali kekosongan anggota KPU. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwiptyana di Jakarta, kemarin, memastikan kepunisan presiden mengenal tidak lanjut putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Hasyim akan terbit dalam kurun waktu tujuh hari setelah putusan dibacakan. "Saat ini, Kementerian Sekretariat Negara masih menunggu salinan putusan DKPP," kata Ari. Dia memastikan pemberhentian Hasyim tidak akan mengganggu tahapan

pemilihan kepala daerah (pilkada) pada November. "Karena terdapat mekanisme pemberhentian antarwaktu untuk mengisi kekosongan anggota KPU," kata Ari. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang juga memastikan segera memproses penggantian Hasyim. "Sesegera mungkin, kami akan rapatkan di Komisi II DPR," kata dia. Junimart menjelaskan Hasyim akan diganti calon komisioner berdasarkan urutan perolehan suara saat proses seleksi. Berdasarkan *fit and proper test* calon anggota KPU pada 2022, perolehan suara peringkat kedelapan ialah Viryan Aziz yang telah meninggal dunia. Di urutan sembilan ada Ifha Rosita yang kini merupakan komisioner KPJ Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPR dari F-PKS Aus Hidayat Nur menjelaskan DPR akan menentukan sosok yang akan mengisi kekosongan komisioner KPU. Pengisian posisi Ketua KPU, Aus menjelaskan, ditentukan internal KPU. Namun, Aus menyebut Hasyim bisa melakukan naik banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika tak berkenan dengan putusan DKPP. Mantan Ketua KPU Ilham Saputra

menjelaskan penggantian Hasyim bergantung pada pemerintah dan DPR. "Apakah hendak menunggu apakah yang bersangkutan menggugat ke PTUN atau tidak, tergantung *will* pemerintah dan DPR," katanya. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah pernah memutuskan putusan DKPP bisa menjadi objek gugatan di PTUN. Yang pasti, imbuhnya, saat ini diperlukan upaya untuk segera memulihkan kinerja dan citra KPU. "Sudah ada tugas yang menanti, yakni pilkada." DKPP akhirnya memecat Hasyim dari KPU. Hasyim dinilai terbukti melakukan tindakan asusila berupa ungkapan seksis terhadap seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Pengajar hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Biverti Susanti menilai pemberhentian dan penggantian Hasyim perlu segera dilakukan. Ia mengingatkan, tindak lanjut putusan DKPP itu harus dilaksanakan dengan cepat dengan tetap memperhatikan keutuhan tugas KPU. Pasalnya, KPU sedang menyelenggarakan tahapan Pilkada 2024.

**Ucapan syukur**  
Hasyim berterima kasih atas putusan DKPP disertai ucapan syukur. "Saya mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu," kata Hasyim. Dia tidak menyampaikan permohonan maaf kepada korban yang melaporkan tindakannya. "Kepada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf," tandasnya. Dugaan tindakan asusila oleh Hasyim yang dikukuhkan Majelis DKPP itu nyata nyata bertolak 180 derajat jika dibandingkan dengan ucapan Hasyim saat menjadi khatib salat Idul Adha 1445 H di Semarang, Jawa Tengah. Saat berkhutbah di hadapan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Hasyim memendang makna Idul Adha sebagai menyembelih sifat tercela manusia. "Sifat kebinatangan di manusia harus disembelih. Perbuatan manusia dilandasi taubid, iman, dan takwa," tegasnya, saat itu. (Tri/Ykb/Fah/X-7)